

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Jum, 2012 *"Hukum Administrasi negara"*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Atmosudirjo, Prajudi, 1994, *"Hukum Administrasi Negara"* Jakarta: Ghalia Indonesia
- Effendi, Taufiq. 2004. *Tingkatkan Pelayanan Publik*. Jakarta: Suara Pembaruan.
- Helmi, 2012, *"Hukum Perzinan Lingkungan Hidup"*, Jakarta: Sinar Grafika
- Juklap Kapolri No. Pol / 02 / XII / 95 Tentang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1986, *"Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional"*, Bandung: Binacipta
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, 1993, *"Pengantar Hukum Perizinan"*, yang disunting oleh Philipus M. Hadjon, Surabaya: Yuridika.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 1996 Tentan Penyelenggaraan Kepariwisataaan.
- Purdyatmoko Y. Sri. 2009. *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*. Grafindo: Jakarta.
- Ridwan H.R., 2006, *"Hukum Administrasi Negara"*, Jakarta: Rajagrafindo
- Sutedi, Adrian, 2011, *"Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik"*, Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.